

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan pada penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh migran khususnya buruh migran asal Kabupaten Flores Timur belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, karena dari 30 orang yang dijadikan responden 12 orang yang direkrut oleh PPTKIS 11 orang Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapat perlindungan hukum dari PPTKIS yang bersangkutan dari pra penempatan sampai purna penempatan, sedangkan 1 orang belum mendapat perlindungan hukum dari PPTKIS yang merekrutnya dari Pra penempatan sampai selesai. 18 orang responden buruh migran yang bekerja ke luar negeri secara swadaya 5 orang bekerja di luar negeri tanpa memiliki dokumen seperti paspor sehingga dalam bekerja tidak aman karena mereka takut kalau dilakukan pemeriksaan oleh polisi malaysia. 13 orang buruh migran bekerja ke luar dengan paspor yang diurus sendiri di Nunukan dan selama di malaysia bekerja dengan aman.

B.Saran

Perlu adanya sosialisasi terkait Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,serta perlu adanya kontrol dari Pemerintah terhadap Pelaksana Penempat Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang melakukan perekrutan terhadap Tenaga Kerja yang akan dipekerjakan diluar negeri.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung.
- Asri Wijayanti, 2014, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumadi, 1995, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- F.X.Djumialdji, 2005, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.Zainal Asikin, dkk, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iman Supomo, 1980, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan.
- _____, 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Ninik Maryanti dan Basri Salipi, 1987, *Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prinst Daran, 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- V. Hari Supriyanto, 201, *Kesejahteraan pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Toha Halili dan Hari Pramono, 1987, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Tim kerja di bawah pimpinan Drs.H.Boedi Maryoto, 1997, *Laporan Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri*.

Website:

<http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf>
persoalan buruh migran di indonesia: Identifikasi masalah-masalah buruh migran. Diakses pada 16 september 2015 pukul 12:10 WIB

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.htm> diakses pada 14 September 2015 pukul 12:36 WIB

<http://libra-garden.blogspot.co.id/2012/11/tenaga-kerjaburuh-migran.html> diakses pada 16 september 2015 pukul 11:56 WIB

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri

Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Kamus

Suharso, Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, Widya Karya, Semarang.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)* rangkuman istilah dan pengertian dalam hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum islam, hukum perburuhan, hukum agraria, hukum administrasi negara, hukum pajak dan hukum lingkungan, Cetakan 1, Reality Publisher, Surabaya.

DAFTAR NAMA-NAMA PPTIKS KABUPATEN FLORES TIMUR

No	NAMA PPTIKS	KORWIL	PL
1.	PT. Anugrah Usaha Jaya	Tenawahang	Simon Makin
2.	PT.Sriti Rukman Lestari	Kongga	Yuliana Kolin
3.	PT.Surya Pasific Jaya	Lebao	Alexsander
4	PT.Bina Karya Welastri	Balela	Ester
5	PT. Mutiara Putra Umum		
6	PT.Sukses Mandiri Utama		
7	PT.Okdo Harapan Mulia		
8	PT.Raya Alam Permai		
9.	PT.Al-Kurnia Sentosa Internasional		
10.	PT.Perwita Nusaraya		
11.	PT. Cemerlang Sumber Daya Insani		
12.	PT. Bagoes Bersaudara		
13.	PT. Mangun Jaya Perkasa		
14.	PT. Citra Bina Tenaga Mandiri		
15.	PT. Hasrat Insan Nurani		
16.	PT. Panca Mega Bintang		

17.	PT. Tristama Argaraya	Amagarapati	Alo Tapun
18.	PT.Bumi Mas Citra Mandiri	Boru	Jhon Dasilva
19.	PT. Malindo Mitra Perkasa	Weri	Yeni Doton
20.	PT.Intan Ayu Lestari	Waiwadan	Ismail Ibrahim
21.	PT. Mitra Sinergi Sukses	Kampungtega	Ignas
22.	PT. Asina Adriani Utami		
23.	PT. Lia Central Utami		